



WTP Pemprov Kalbar Kali Ini Tanpa Catatan Tapi Beberapa Temuan Harus Ditindaklanjuti

PONTIANAK-RK. Mantap, Laporan Keuangan tahun 2014 dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dinilai tersaji Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Yaitu: Penganggaran Rp20,79 M di PU, Belanja Hibah Rp420 juta, dan Bantuan Partai Politik Rp1,08 M

Tentu saja, Gubernur Kalbar, Cornelis gembira bukan main.

Hanya saja, ternyata ada kesalahan penganggaran di Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan sejumlah hal

■ Halaman 7



Gubernur Cornelis mengangkat piagam penghargaan WTP yang diserahkan Ketua VI BPK RI Prof. Bahrullah Akbar, Senin (8/6). **ISFIANSYAH-RK**



Tapi Beberapa Temuan Harus Ditindaklanjuti

pada 6 SKPD masih perlu penataan. Ini disampaikan Ketua VI BPK RI, Profesor Bahrullah Akbar, dalam rangkaian penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) berbuah WTP itu kepada Ketua DPRD Kalbar, M. Kembang L.

Bahrullah menegaskan, laporan keuangan 2014 Pemprov Kalbar telah sesuai dengan materi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). "BPK RI mengapresiasi upaya tindak lanjut atas rekomendasi BPK RI yang telah dilakukan Pemprov Kalbar atas LHP Keuangan TA 2013, sehingga dalam laporan keuangan 2014 tidak terdapat hal yang perlu diungkapkan dalam paragraf penjelas seperti pada opini tahun sebelumnya," ungkapnya, dalam paripurna istimewa DPRD di Gedung DPRD Provinsi Kalbar, Jalan A. Yani, Senin (8/6).

Namun, Bahrullah melanjutkan, pengelolaan aset tetap tanah, peralatan mesin, bangunan pada enam SKPD (PU, Pertanian, Biro Umum, Dispenda, Dikbud, plus RSUD Soedarso) perlu diperbaiki dan ditingkatkan kualitasnya.

Dan, ternyata, terdapat kesalahan penganggaran belanja daerah TA 2014 di Dinas PU Kalbar sebesar Rp20,79 miliar. Serta, laporan pertanggungjawaban atas belanja hibah sebesar Rp420 juta, kemudian belanja bantuan keuangan kepada partai politik sebesar Rp1,08 Miliar, yang perlu Bahrullah

sampaikan kepada Gubernur.

"Sekarang sudah tidak ada catatan tapi ada beberapa temuan yang harus ditindaklanjuti. Kita selalu memperhatikan aset pemerintah pusat, asetnya termasuk di pemerintahan daerah," ujarnya.

Menurut Bahrullah, dalam menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan berikut perbaikan tata kelola keuangan agar lebih baik, pihaknya mendorong kepala daerah dan kepala satuan kerja untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan, melakukan perbaikan pengelolaan keuangan daerah, agar dapat mempertahankan opini WTP.

"Dan, segera mengimplementasikan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah berbasis Akrua. Yang tidak kalah penting adalah penguatan inspektorat," ulas dia.

BPK RI berharap agar pemerintah daerah dan lembaga legislatif dapat segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan mereka tersebut. "Sesuai amanat Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara, pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laoran hasil pemeriksaan dan menyampaikan hasil tindaklanjutnya ke BPK RI Perwakilan Kalbar selambat-lambatnya 60 hari setelah hasil

pemeriksaan diterima," tegas Bahrullah.

Ia juga menyebut bahwa predikat WTP berbentuk opini lembaganya tersebut bukan tujuan akhir pertanggungjawaban uang negara. Sebab, gelar WTP tidak menjamin pengelolaan uang negara bebas dari kecurangan.

Gubernur Cornelis, yang didampingi Wakil Gubernur Christiandy Sanjaya, tidak bisa menyembunyikan kegembiraan atas kerja kerasnya dan jajaran dalam mendapatkan opini predikat WTP oleh BPK itu. Gubernur menyampaikan akan terus melanjutkan hal yang baik dan memperbaiki yang perlu diperbaiki.

"Inikan namanya kerja pemerintah selalu berurusan dengan keuangan. Kita sudah maksimal mengenai kekurangan maka perlu kerja keras terus menerus," ujarnya, bangga.

Sementara, Kepala Dinas PU Kalbar, Jakius Sinyor, mengatakan sudah membentuk tim untuk menyelesaikan temuan BPK berupa salah penganggaran Rp20,79 milyar tersebut. "Sudah kita bentuk tim terpadu, termasuk di dalamnya ada inspektorat yang akan menyelesaikan hal ini. Mudah-mudahan dalam 60 hari ini selesai," ujarnya.

**Laporan: Isfiansyah
Editor: Mohamad iQbal**